

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 ayat (1) Bupati/walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada ayat (4). Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat

pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, kelembagaan daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan daerah kabupaten/kota, pembangunan daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Sampai saat ini Inspektorat Daerah sudah melaksanakan pengawasan yang terkait langsung dengan kebijakan nasional diantaranya peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kegiatan Saber Pungli dan Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana

kerja pemerintah daerah. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD.
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah : “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi, Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 Misi Pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten / Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Sedangkan untuk prioritas unggulan yang dirumuskan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 10 program unggulan tersebut yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat : pelatihan tentang demokrasi tentang pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di Kabupaten / Kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintergrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan stratup untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi misal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung / irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Kebijakan Nasional dan Propinsi tersebut yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Visi adalah gambaran dan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun mendatang

untuk periode Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Visi tersebut adalah **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Daerah, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah **Misi Kelima Bupati terpilih yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**. Pengertian Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup peningkatan kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Di samping itu juga memerlukan kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif, efisien, transparan dan Akuntabel, akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh masyarakat Karanganyar untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Karanganyar yang makmur, sejahtera dan damai (dengan akhlak yang mulia).

Dalam hal mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian internal mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan sesuai peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner*, untuk mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN dan mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah, Pelaksanaan

Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi yaitu:

1. Perencanaan Program Pengawasan;
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Berdasarkan dokumen Perubahan RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Mengacu pada grand design 8 area perubahan pada reformasi birokrasi yaitu :

a. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi kementerian / lembaga / pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efesiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari

program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah fokus terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan, dan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dijelaskan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme, maka dalam Perubahan RENSTRA 2018-2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah **“Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas”** dengan indikator tujuan Maturitas SPIP.

2. Sasaran

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu meningkatnya Kapabilitas APIP. Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KERJA 2018-2023
INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal	Target Program dan Kegiatan					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas SPIP	1.	Level Kapabilitas APIP	Na	3	3	3	3	3	3

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan visi Kepala Daerah yaitu “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” ada 5 misi dari Bupati / Wakil Bupati guna melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karanganyar yaitu:

- a. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
- b. Pemberdayaan perekonomian rakyat
- c. Pendidikan gratis SD/SMP/SMA dan kesehatan gratis
- d. Pembangunan Desa sebagai pusat pertumbuhan
- e. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Dari misi yang telah ditetapkan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah terdapat pada misi kelima yaitu “Peningkatan kualitas keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga” dengan arah kebijakan Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Fasilitasi desa mandiri dan berkembang;
- b. Masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif;
- c. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak;
- d. Perlindungan, pelestarian, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah;
- e. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul;
- f. Pengembangan inovasi dan prestasi daerah;
- g. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - 2) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Penyediaan Bahan/Material;
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya.

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Pengawasan Desa;
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal;
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi.
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;

- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Hal ini dikarenakan seluruh target kegiatan yang akan dilaksanakan sudah diperhitungkan dengan matang dan sesuai dengan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Karanganyar

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Inspektorat Daerah				#####				16.097.000.000
						A.1. Belanja Operasi				#####				16.047.000.000
						Belanja Pegawai				6.204.253.000				9.200.000.000
						Belanja Barang Jasa				4.153.000.000				6.847.000.000
						A.2. Belanja Modal				25.000.000				50.000.000
6						Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
6	01					Inspektorat Daerah Daerah				#####				16.097.000.000
6	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur 3. Presentase tertib pelaporan keuangan 4. Capaian Nilai SAKIP	Inspektorat Daerah		7.507.253.000	DAU			12.267.000.000
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Inspektorat Daerah	100%	20.000.000	DAU	100%		32.000.000
6	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	2 Dokumen (Renja dan Perubahan Renja) Renstra	4.000.000	DAU		2 Dokumen (Renja dan Perubahan Renja) Renstra	12.000.000
6	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	2 Dokumen (LPT dan LKPD)	4.000.000	DAU		2 Dokumen (LPT dan LKPD)	10.000.000

6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	Inspektorat Daerah	100%	225.000.000	DAU	100%	100%	500.000.000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terwujudnya APMP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	Inspektorat Daerah	12 Bulan	225.000.000	DAU		12 Bulan	500.000.000
6	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	100%	417.000.000	DAU	100%	100%	1.155.000.000
6	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pencegahan kebakaran	Inspektorat Daerah	1 Paket 3 Tabung	25.000.000	DAU	1 Paket 3 Tabung	100.000.000
6	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan Jumlah tabung LPG yang disediakan	Inspektorat Daerah	1 Paket 24 Tabung	25.000.000	DAU	1 Paket 24 Tabung	150.000.000
6	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Inspektorat Daerah	1 Paket	60.000.000	DAU	1 Paket	100.000.000
6	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah	12 Bulan	2.000.000	DAU	12 Bulan	10.000.000
6	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Inspektorat Daerah	1 paket	85.000.000	DAU	1 paket	175.000.000
6	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Kecil Jumlah Makan Perseorangan Jumlah Jamuan Tamu	Inspektorat Daerah	1500 dos 1500 dos 100 pax	85.000.000	DAU	1500 dos 1500 dos 100 pax	220.000.000
6	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasaan	Inspektorat Daerah	12 bulan	85.000.000	DAU	12 bulan	350.000.000
6	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya penatausahaan arsip Jumlah THL	Inspektorat Daerah	12 bulan 1 Orang	30.000.000	DAU	12 bulan 1 Orang	30.000.000
6	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	100%	25.000.000	DAU	100%	100%	50.000.000
6	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Inspektorat Daerah	1 Paket	25.000.000	DAU	1 Paket	50.000.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	100%	260.000.000	DAU	100%	100%	525.000.000
6	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket benda pos yang disediakan Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket Jumlah THL	Inspektorat Daerah	1 Paket 12 Bulan 1 Orang	50.000.000	DAU		1 Paket 12 Bulan 1 Orang	125.000.000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telepon, dan internet	Inspektorat Daerah	12 bulan	210.000.000	DAU		12 bulan	400.000.000

6	01	01	2	09		Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	100%	320.000.000	DAU	100%	100%	675.000.000
6	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat Daerah	24 Unit	200.000.000	DAU		24 Unit	550.000.000
6	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Inspektorat Daerah	1 paket	40.000.000	DAU		1 paket	100.000.000
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah THL	Inspektorat Daerah	1 paket 2 Orang	55.000.000	DAU		1 paket 2 Orang	150.000.000
6	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Inspektorat Daerah	1 paket	25.000.000	DAU		1 paket	75.000.000
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pembudayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Kabupaten Karanganyar	1. Presentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah; 2. Presentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan; 3. Presentase tindak lanjut dengan rekomendasi; 4. Presentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti; 5. Presentase LHR LKPD dan OPD	2.100.000.000	DAU		1. Presentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah; 2. Presentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan; 3. Presentase tindak lanjut dengan rekomendasi; 4. Presentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti; 5. Presentase LHR LKPD dan OPD	2.925.000.000
6	01	02	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obyek dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Karanganyar	100%	1.900.000.000	DAU	100%	100%	2.675.000.000
6	01	02	2.01	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	16 LHP	200.000.000	DAU		16 LHP	500.000.000
6	01	02	2.01	02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	56 LHP	350.000.000	DAU		56 LHP	475.000.000
6	01	02	2.01	03		Revisi Laporan Kinerja	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi Jumlah revisi LKIP Jumlah revisi LPPD	Inspektorat Daerah	41 LHR 1 LHR 1 LHR	100.000.000	DAU		41 LHR 1 LHR 1 LHR	125.000.000
6	01	02	2.01	04		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Hasil Revisi DAK Jumlah Hasil Revisi LKPD dan LK OPD Jumlah Hasil Revisi RKA/RKAP Jumlah Hasil Revisi RKPD/RKPD Perubahan	Kabupaten Karanganyar	24 LHP 11 LHP 41 LHP 41 LHP	250.000.000	DAU		24 LHP 11 LHP 41 LHP 41 LHP	375.000.000
6	01	02	2.01	05		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Karanganyar	32 LHP	250.000.000	DAU		32 LHP	350.000.000
6	01	02	2.01	06		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar Terseleenggaranya rapat koordinasi	Kabupaten Karanganyar	12 Laporan 12 Bulan	250.000.000	DAU		12 Laporan 12 Bulan	500.000.000
6	01	02	2.01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Obrik Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP Jumlah THL Lervanda	Kabupaten Karanganyar	41 Obrik 4 Orang	500.000.000	DAU		41 Obrik 4 Orang	650.000.000

6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Karanganyar	100%	200.000.000	DAU	100%	100%	250.000.000
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Audit Investigasi Jumlah Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Karanganyar	20 Kasus	100.000.000	DAU		20 Kasus	100.000.000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Audit Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Karanganyar	10 Kegiatan	100.000.000	DAU		10 Kegiatan	150.000.000
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Kab Karanganyar	1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN 2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi 3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	775.000.000	DAU		1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN 2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi 3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	905.000.000
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terciptanya kebijakan pendampingan dan asistensi yang baik	Inspektorat Daerah	100%	170.000.000	DAU	100%	100%	300.000.000
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peningkatan level kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah	Level 3	70.000.000	DAU		Level 3	100.000.000
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah	PKPT	100.000.000	DAU		PKPT	200.000.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kabupaten Karanganyar	100%	605.000.000	DAU	100%	100%	605.000.000
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Inspektorat Daerah	41 Perangkat Daerah	150.000.000	DAU		41 Perangkat Daerah	80.000.000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karanganyar	10 Perangkat Daerah	55.000.000	DAU		10 Perangkat Daerah	75.000.000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi	Kabupaten Karanganyar	7 Laporan 3 THL	300.000.000	DAU		7 Laporan 3 THL	200.000.000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Karanganyar	1 Kegiatan	100.000.000	DAU		1 Kegiatan	250.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam usulan renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 diproyeksi bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Proyeksi pendanaan tersebut merupakan usulan SKPD yang bersumber dari dokumen perencanaan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcomes*)/kegiatan (*output*) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2023	Prakiraan Maju 2024	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6														
6	01											10.382.253.000	*****	
6	01	001										7.507.253.000	12.267.000.000	
6	01	001	2.01											
6	01	001	2.01	001										
6	01	001	2.01	006										
6	01	001	2.01	007										
6	01	001	2.02											

6	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	6.204.253.000	9.200.000.000	
6	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai	70 PAK	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	20.000.000	90.000.000	
6	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	4.000.000	10.000.000	
6	01	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	5.000.000	10.000.000	
6	01	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	3.500.000	10.000.000	
6	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	3.500.000	10.000.000	

6	01	001	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78			Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	12 bulan	225.000.000	500.000.000	
6	01	001	2.02	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Terwujudnya APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	12 bulan	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	12 bulan	225.000.000	500.000.000	
6	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78			Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	417.000.000	1.155.000.000	
6	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pencegahan kebakaran	1 Paket 3 Tabung	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	25.000.000	100.000.000	
6	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah tabung LPG yang disediakan	1 Paket 24 Tabung	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		25.000.000	150.000.000	
6	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	60.000.000	100.000.000	

6	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	2.000.000	10.000.000	
6	01	001	2.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	85.000.000	175.000.000	
6	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Jamuan Tamu Jumlah Makan Perseorangan Jumlah Minum dan Makan Kecil	100 pax 1500 Box 1500 Box	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	85.000.000	220.000.000	
6	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	12 bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	85.000.000	350.000.000	
6	01	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah THL Terselenggaranya penatausahaan arsip	1 Orang 12 Bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	50.000.000	50.000.000	

6	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78			Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	25.000.000	50.000.000	
6	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	25.000.000	50.000.000	
6	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78			Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	260.000.000	525.000.000	
6	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah paket benda pos yang disediakan Jumlah THL Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket	1 Paket 1 Orang 12 Bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	50.000.000	125.000.000	
6	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telepon, dan internet	12 Bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	210.000.000	400.000.000	
6	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78			Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	320.000.000	675.000.000	
6	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	200.000.000	350.000.000	
6	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yangelihara	1 Paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	40.000.000	100.000.000	
6	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah THL	1 Paket 2 Orang	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	55.000.000	150.000.000	
6	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 Paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	25.000.000	75.000.000	

6	01	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Persentase tindak lanjut atau masyarakat dan rekomendasi hasil pemerikasaan	98%			2.100.000.000	2.925.000.000	
										Persentase hasil temuan pemerikasaan atau ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	10%					
										Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	95%					
										Persentase jumlah aduan yang diundaklanjuti	100%					
										Jumlah LHR LKPD	1 LHR LPPD					
6	01	002	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	1.900.000.000	2.675.000.000	
6	01	002	2.01	001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 LHP	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	500.000.000	500.000.000	
6	01	002	2.01	002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 LHP	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	350.000.000	475.000.000	
6	01	002	2.01	003 Reviu Laporan Kinerja	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi	41 LHE	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100.000.000	125.000.000	
										Jumlah reviu LKHP	1 LHP					
										Jumlah reviu LPPD	1 LHP					
6	01	002	2.01	004 Reviu Laporan Keuangan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Hasil Reviu DAK	24 LHP	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	250.000.000	275.000.000	
										Jumlah Hasil Reviu LKPD dan LK OPD	11 LHP					
										Jumlah Hasil Reviu RKA/RKAP	41 LHP					
										Jumlah Hasil Reviu RKPD/RKPD Perubahan	41 LHP					
6	01	002	2.01	005 Pengawasan Desa	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 LHP	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	250.000.000	350.000.000	
6	01	002	2.01	006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar	12 Laporan	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	250.000.000	300.000.000	
										Terselenggaranya rapat koordinasi	12 Bulan					

6	01	002	2.01	007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Obrik Hasil Monitoring dan Evaluasi TL Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP	41 Obrik 4 Orang	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	500.000.000	650.000.000	
6	01	002	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah THL		Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	200.000.000	250.000.000	
6	01	002	2.02	001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Audit Investigasi Jumlah Kerugian Negara/Daerah	20 Kasus	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100.000.000	100.000.000	
6	01	002	2.02	002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Audit Dengan Tujuan Tertentu	10 Kegiatan	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100.000.000	150.000.000	
6	01	003			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	100%					775.000.000	905.000.000	
									Persentase SKPD yang telah menerapkan SIPP pada level terdefinisi	100%							
									Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100%							
6	01	003	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Terwujudnya kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan	100%	170.000.000	300.000.000	
6	01	003	2.01	001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan level kapabilitas APIP	3 Level	Terwujudnya kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan	100%	70.000.000	100.000.000	
6	01	003	2.01	002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1 PKPT	Terwujudnya kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan	100%	100.000.000	200.000.000	

6	01	003	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	605.000.000	605.000.000	
6	01	003	2.02	001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	150.000.000	80.000.000	
6	01	003	2.02	002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 perangkat daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	55.000.000	75.000.000	
6	01	003	2.02	003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7 Laporan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	300.000.000	200.000.000	
6	01	003	2.02	004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Terwujudnya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Kegiatan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	100.000.000	250.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan Perubahan RPJMD, disesuaikan dengan visi misi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, dengan tersusunnya rencana kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Karanganyar yaitu **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

